

MULTIKULTURAL DAN LINTAS BUDYA

Oleh

Yoseph Andreas Gual

Tulisan ini adalah sebuah analisis singkat terkait kehidupan multikulturalisme dan lintas budaya dalam konteks kehidupan politik di Indonesia di tahun 2022 di mana langkah-langkah politik para aktor politik dari berbagai partai terlihat secara jelas melalui media mainstream dan media sosial. Gerilya politik para aktor partai ini kadangkala yang kelihatan tidak memperhitungkan realitas masyarakat Indonesia yang sangat beragam yang pada akhirnya dapat mengancam keutuhan kehidupan berbangsa.

1) Apa yg anda tangkap dalam pesan tulisan yang bersifat analisis hal politis?

Dalam politik tidak ada teman atau musuh abadi. Kepentingan adalah teman abadi bagi semua aktor dan partai politik. Hari ini aktor A bisa berdamai dan bersahabat dengan aktor B dan berhadap-hadapan muka dengan aktor C sedangkan aktor D tidak disentuhnya. Namun di lain waktu ketika kepentingan aktor A berseberangan aktor B tapi sama dengan aktor C, Si A akan meninggalkan si B, memeluk si C dapat pula menikam si D karena menghalangi jalannya.

Hal ini terlihat dalam dinamika politik yang dipertontonkan oleh para aktor dan partai politik saat ini di Senayan. Meskipun pemilihan presiden-wakil presiden dan legislatif masih dua tahun namun akrobat politik sudah dipertontonkan oleh aktor dan partai politik. Koalisi partai politik tahun 2019 guna mendukung pemerintahan presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf Amin seharusnya berjalan hingga 2024 tanpa ada goncangan kepentingan namun hal tersebut, jauh panggang dari api. Koalisi ini mulai goyang ketika tahun koalisi baru berjalan tiga tahun. Setiap partai sudah menentukan koalisi baru untuk tahun 2024 namun masih bertahan dalam perahu koalisi 2019.

Sepatutnya, drama politik semacam ini tidak perlu dipertontonkan secara jelas kepada publik. Tiap aktor dan partai politik memang perlu mempersiapkan amunisi dan strategi menjelang perhelatan politik lima tahunan pada tahun 2024 namun

seyogyanya gerakan-gerakan tersebut tidak terlalu kasar dan keras karena masih cukup waktu. Lebih elok jika partai-partai berkuasa ini menunjukkan kualitas kerja mereka di berbagai bidang yang dipercayakan kepada mereka sehingga kualitas pelayanan mereka itulah yang akhirnya menjadi jualan utama mereka di tahun 2024. Namun yang kelihatan sekarang dalam diskursus publik yang muncul malah pertikaian antaraktor dan parpol dalam koalisi karena setiap partai politik dengan berani telah menentukan patner koalisi berikutnya di tahun 2024.

Dan yang tidak elok lainnya adalah diskursus ini akhirnya mengotori ruang-ruang publik yang harusnya diisi oleh wacana implementasi berbagai kebijakan pembangunan bangsa, wacana pembangunan di berbagai bidang, diskusi-diskusi pembangunan berkeadilan dan perjuangan hak asasi dan implementasi teknologi dalam masyarakat dan pemerpihakan kepada berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa terutama masyarakat bawah.

Masyarakat memahami bahwa aktor dan partai politik membutuhkan amunisi dan strategi untuk tahun 2024 namun gerakan mempersiapkan hal-hal tersebut harusnya dijalankan secara santun dan halus agar tidak membuat goncangan berarti yang pada akhirnya membuat perpecahan pada masyarakat bawah. Akibat gerakan politik yang dilakukan oleh aktor dan partai politik, segregasi politik yang sudah terjadi sejak pilkada Jakarta 2016 lalu kembali terkuak lebar. Masyarakat bawah terbelah menjadi kadrunk dan cebong hingga kini, malah cenderung dipertahankan dan dimanfaatkan.

Dalam drama ini juga memperlihatkan garis demarkasi tiap partai politik bukanlah idiologi partai melainkan kepentingan. Seyogyanya partai yang berkoalisi adalah mereka yang searah seirama dalam hal ideologi – dalam arti partai nasional lebih cocok bila berkoalisi dengan partai nasionalis, partai kanan – keagamaan berkoalisi dengan partai serupa, partai kiri berkoalisi dengan partai kiri. Dengan model semacam ini semua kebijakan yang diambil oleh partai koalisi tidak memiliki halangan berarti dalam internal partai koalisi. Partai-partai yang berkoalisi ketika berkuasa tidak terlalu menghadapi tarik ulur penetapan kebijakan karena arah ideologi mereka mirip sehingga substansi kebijakan tidak terlalu dipermasalahkan mungkin teknis implementasinya yang perlu upaya penyesuaian.

Namun situasi di Indonesia dan saat ini dan ke depan tidak demikian adanya. Ideologi bukanlah pertimbangan utama dalam pemilihan dan keputusan sebuah koalisi oleh partai politik. Pertimbangan utama partai-partai dalam sebuah koalisi yakni kemungkinan terdekat kekuasaan dapat diraih atau tidak dengan koalisi yang dibangun bersama. Efeknya ketika partai-partai berbeda ideologi berhasil meraih kekuasaan yang menjadi persoalan adalah pembagian jatah kekuasaan dan gentok-gentokan dalam penentuan kebijakan dan tarik ulur implementasi kebijakan. Misalnya, partai nasionalis ingin sebuah kebijakan yang lebih terbuka namun dihalangi atau ditantang oleh anggota koalisinya sendiri yang dari sayap kanan.

2) Bagaimana perilaku oknum politisi dalam bingkai multikultural di Indonesia dan praktiknya demi diri, kelompok, dan bangsa Indonesia.

Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang multikultural ini, seharusnya aktor dan partai politik bersepakat bahwa apapun arah ideologi dan kebijakan partai politiknya, tujuan bernegara hanya satu yakni meminjam istilah Bertrand Russell, memajukan kerja sama sosial di antara umat manusia dengan menjalankan kebijaksanaan agar kebahagiaan bersama, kedamaian lahir batin dan saling pengertian di dunia dapat tercapai. Atau dalam ideologi negara kita terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai persatuan dan kesatuan yang majemuk.

Bila ini yang ingin dicapai oleh semua aktor dan partai politik maka tujuan berpolitik semua komponen bangsa bukan untuk mengubah landasan dasar negara dengan empat pilarnya dengan dasar yang lain. Juga proses mendapatkan kekuasaan politik tidak bisa dengan menghancurkan keanekaragaman ke-Indonesiaan yang sudah ada sejak awal bangsa ini ada. Dengan kata lain, politik identitas harus dihilangkan dalam kanzah perpolitikan anak bangsa.

Arah dan gerak untuk merebut, mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh semua anak bangsa apapun latar belakang politiknya yakni memajukan kehidupan bangsa di semua aspek hidup agar nama Indonesia dikenal di seluruh dunia dan kualitas hidup bangsa baik lahiriah maupun batiniah tercukupi secara berlimpahan dalam bingkai dan tegaknya NKRI, Pancasila,

UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Itu juga berarti politik identitas menjadi frase haram apalagi dipraktikkan dalam kanzah perpolitikan di Indonesia.

Dengan demikian etika politik tiap anak bangsa harus berpegang pada tiga hal berikut: (1) Mereka yang ingin berkuasa di Indonesia bukan menjadikan kekuasaan sebagai sebuah tujuan namun perebutan kekuasaan dilakukan untuk tujuan tertentu yang lebih berarti. (2) Tujuan kekuasaan yang diperebutkan oleh aktor atau partai politik harusnya tidak hanya memuaskan aktor dan partai politik itu sendiri tetapi juga membantu memuaskan tujuan lebih banyak orang lintas partai dan golongan. (3) Untuk mendapatkan kekuasaan tidak boleh menghalalkan cara atau menghancurkan kestabilan dan keanekaragaman hidup berbangsa dan bernegara.

3) Bagaimana proyeksinya ke masa depan bagi bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia terus berproses. Ada begitu banyak kepentingan dan kekuatan yang saat ini sedang bersaing di untuk mendapatkan kekuasaan. (1) Ada kaum nasionalis yang ingin Indonesia tetap tegak dengan demokrasi sebagai jalannya. (2) Ada kaum kanan yang cenderung bergerak ke tengah yang masih menerima perbedaan dan hidup dalam perbedaan tanpa merasa perbedaan sebagai ancaman. Kelompok ini masih menerima demokrasi sebagai jalannya.

(3) Namun ada kelompok ekstrim kanan yang berupaya untuk mengubah dasar negara. Mereka memanfaatkan demokrasi untuk mencapai tujuan mereka yakni mengubah landasan bernegara. (4) Ada yang mengemukakan bahwa kelompok kiri bangkit lagi namun tuduhan ini berlebihan – Hal ini semacam sentiment politik kelompok tertentu untuk menjungkal kekuatan nasionalis yang masih berkuasa dan punya kekuatan menjelang tahun 2024. (5) Di sisi lain ada kekuatan pengusaha dan pemodal yang kadangkala tidak memperhitungkan ideologi atau bentuk dan model negara. Yang dipentingkan usaha tetap berjalan dan keuntungan tetap didapatkan. Mereka bisa bergerak ke mana saja. Dengan modal yang kuat mereka bisa menyetir semua partai politik.

(6) Kita juga tidak bisa menafikan kelompok lintas negara yang memiliki kepentingan besar di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam yang

luar biasa. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Ini merupakan pasar yang sangat bagus untuk semua jenis komoditas baik itu yang positif maupun negatif seperti obat-obatan terlarang, perjudian, perdagangan manusia maupun pornografi. Kekuatan lintas negara ini sangat berbahaya jika tidak diprediksi dan diambil kebijakan yang memadai untuk menanggulangi ancaman-ancamannya.

(7) Di sisi lain, ada kekuatan lain yang dulu disepelekan namun saat ini menjadi yang terbesar di Indonesia yakni masyarakat itu sendiri. Komponen terakhir ini dulu dianggap tidak memiliki kekuatan berarti namun dengan kemajuan teknologi terutama internet dan media sosialnya, kelompok masyarakat bawah ini memiliki kekuatan yang luar biasa berpengaruh dalam mempengaruhi kebijakan dan opini publik. Persoalannya dalam kelompok ini tidak semua paham politik, kritis dan terliterasi tentang media digital dan pesannya. Kelompok ini membutuhkan pendidikan politik dan literasi digital agar cerdas dan kritis dalam menanggapi semua fenomena sosial di internet dan media sosial.

Saya percaya medan perang antarkelompok di atas saat ini dan ke depan ada di ruang maya melalui internet dan media sosial. Akan ada banyak *hoax* bertebaran. Akan ada banyak propaganda yang berseliwerang. Semua kubu akan memainkan strategi dan triknya untuk memenangkan isu dan simpati masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergisitas semua kelompok masyarakat agar bersepakat untuk mengisi ruang-ruang maya dengan pesan-pesan positif. Namun menurut saya hal ini tidak akan mungkin dengan semua nafsu kuasa yang dipertontonkan saat ini oleh aktor dan partai politik. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah kerja sama semua komponen bangsa yang peduli dengan kemajuan dan kedamaian negara agar bahu membahu melakukan pendidikan politik dan literasi media digital bagi semua kelompok anak bangsa.

Semua yang berkehendak baik di negara ini memiliki kewajiban untuk memenuhi ruang-ruang publik dan ruang maya kita dengan informasi-informasi yang benar dan positif. Informasi *hoax* hanya bisa dilawan dengan informasi yang benar dan baik. Propaganda hitam harus dilawan dengan propaganda putih. Diskusur dilawan dengan diskursus.

Dengan cara demikian, masyarakat akan semakin cerdas. Kecerdasan dan kekritisannya masyarakat dalam menyingkapi berbagai fenomena sosial politik memberi arah baik dan baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya yakin Indonesia akan menjadi lebih baik ke depan.

4) Sesungguhnya mereka itu sibuk memikirkan siapa menurut anda?

Ketika aktor dan partai politik berpolitik dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhitungkan konsekwensi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk, sebenarnya kelompok-kelompok ini sedang memperjuangkan kekuasaan untuk kekuasaan atau kekuasaan untuk perut diri sendiri dan kelompoknya.

Menurut saya dalam sistem demokrasi perlu disiapkan sistem untuk menghalangi aktor atau kelompok atau partai politik model ini untuk berkuasa. Namun hal ini sulit dilakukan dalam sistem demokrasi yang memberi semua perbedaan pandangan tumbuh. Oleh karena itu, palang pintu terakhir untuk membatasi ruang gerak kelompok ini dikembalikan kepada masyarakat.

Masyarakat di sini ada dua kelompok. *Pertama*, yang mahir dan menguasai dinamika politik. Mereka ini adalah kaum politisi, cendikiawan, rohaniwan, LSM dan kelompok masyarakat lain yang paham dinamika sosial politik. Mereka perlu memanfaatkan berbagai kemampuan, usaha, kecerdasan, relasi, peluang, pendidikan dan sumberdaya lainnya untuk membuat wacana tandingan untuk melawan kelompok-kelompok berpikiran sempit. Perang wacana dan pendidikan politik harus diusahakan oleh kelompok terpelajar ini bagi kelompok kedua yang lebih besar namun terbatas dalam memahami dinamika dan konteks politik.

Kelompok *kedua*, adalah kelompok pemilih yakni masyarakat biasa/bawah. Kelompok ini memiliki dua kekuatan yakni melawan kelompok pemecah belah ini dengan menyebarkan informasi-informasi positif dan baik yang sudah dikembangkan oleh kelompok pertama ke berbagai lini. Kedua, menggunakan hak pilih mereka dengan tidak memilih para aktor atau partai politik yang menggunakan cara-cara kasar dan memecah belah untuk meraih kekuasaan.